

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **A. Pertumbuhan Ekonomi**

##### **1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi**

Kebanyakan literatur ekonomi mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.<sup>1</sup> Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menunjukkan makin meningkatnya kegiatan perekonomian di daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai: *perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah.* Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya

---

<sup>1</sup> Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 77

kemampuan suatu Negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan berkembang. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk, dan pengalaman kerja, dan pendidikan menambah ketrampilan mereka.<sup>2</sup>

Pertumbuhan ekonomi dapat digunakan untuk mengukur prestasi dari perkembangan suatu ekonomi. Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu Negara, seperti penambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah,

---

<sup>2</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), 9

pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal.<sup>3</sup>

Pertumbuhan ekonomi wilayah/daerah adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah/daerah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (added value) yang terjadi. Perhitungan pendapatan wilayah pada awalnya dibuat dalam harga berlaku. Namun agar dapat melihat pertambahan dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya, harus dinyatakan dalam nilai riil atau bisa disebut juga dengan harga konstan.<sup>4</sup> Adanya pertumbuhan ekonomi sangat penting karena dapat memengaruhi hal-hal berikut:<sup>5</sup>

#### 1) Tingkat Kesejahteraan

Rakyat dikatakan makin sejahtera setidak-tidaknya *output* nasional per kapita meningkat. Tingkat kesejahteraan tersebut meningkat apabila pertumbuhan

---

<sup>3</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, 423

<sup>4</sup> Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 46

<sup>5</sup> Asfia Murni, *Ekonomika Makro* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), 173-174

GNP per kapita harus melebihi pertumbuhan penduduk. Jika pertambahan penduduk suatu Negara adalah 2% per tahun, maka pertumbuhan GNP harus lebih besar dari 2%.

## 2) Kesempatan Kerja

Terjadinya pertumbuhan ekonomi ditandai dengan naiknya GNP riil. Kondisi ini jelas sangat membuka kesempatan kerja bagi seluruh faktor produksi. Mengingat manusia adalah salah satu faktor produksi terpenting dalam proses produksi, maka kesempatan kerja akan meningkat apabila *output* nasional meningkat.

## 3) Distribusi Pendapatan

Pertumbuhan ekonomi dapat juga diharapkan untuk memperbaiki distribusi pendapatan yang lebih merata. Tanpa adanya pertumbuhan ekonomi, yang akan ada hanyalah pemerataan kemiskinan. Upaya pemerataan pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan dapat berupa:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menerapkan kebijakan-kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal yang dapat menaikkan daya beli masyarakat.
- b. Memperluas kesempatan kerja.
- c. Meningkatkan produktivitas.

## 2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

- a. Teori Ekonomi Klasik

Menurut pandangan Adam Smith, kebijakan *laissez-faire* atau disebut juga dengan mekanisme pasar yang akan menimbulkan tingkat pembangunan ekonomi yang akan dicapai oleh suatu masyarakat.<sup>6</sup> Sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi kedalam kondisi yang *full employment*, dan menjamin pertumbuhan ekonomi hingga mencapai posisi stasioner (*stationary state*).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, 244.

<sup>7</sup> Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, 47.

Pandangan Adam Smith kemudian dikoreksi oleh John Maynard Keynes. Menurut pandangannya, bahwa untuk menjamin pertumbuhan yang stabil perlu adanya kebijakan fiskal (perpajakan dan pembelanjaan pemerintah), kebijakan moneter (tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar), dan pengawasan langsung oleh pemerintah.

Ahli ekonomi setelah itu ada yang mendukung dan memperluas pandangan Adam Smith dan ada juga yang mendukung dan memperluas pandangan Keynes. Keduanya tetap mengandalkan mekanisme pasar. Perbedaannya adalah ada yang menginginkan peran pemerintah yang cukup besar tetapi adapula yang menginginkan peran pemerintah yang sekecil mungkin. Walaupun berbeda, kedua kelompok ini umumnya sependapat bahwa salah satu tugas Negara adalah menciptakan distribusi pendapatan yang tidak terlalu pincang sehingga pertumbuhan ekonomi bisa mantap dan berkelanjutan.

Terlepas dari kekurangan yang terdapat dalam teori Smith, pandangannya masih banyak yang relevan untuk diterapkan dalam perencanaan pertumbuhan ekonomi wilayah. Untuk itu, hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah memberi kebebasan kepada setiap orang dan badan untuk berusaha (pada lokasi yang diperkenankan), tidak mengeluarkan peraturan yang menghambat pergerakan orang dan barang, tidak membuat tarif pajak daerah yang lebih tinggi dari daerah lain sehingga pengusaha enggan berusaha di daerah tersebut, menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga relative aman untuk berusaha, menyediakan berbagai fasilitas dan prasarana sehingga pengusaha dapat beroperasi dengan efisien serta tidak membuat prosedur penanaman modal yang rumit, menciptakan iklim yang kondusif sehingga investor tertarik menanamkan modalnya di wilayah tersebut.

b. Teori Neo-Klasik

Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung pada penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi.<sup>8</sup> Akumulasi modal ini dapat dilakukan dengan penambahan stok modal yang dilakukan secara langsung melalui investasi secara fisik seperti pengadaan pabrik baru, mesin-mesin, peralatan dan bahan baku atau dengan melakukan investasi fasilitas penunjang seperti infrastruktur yaitu pembangunan jalan raya, penyediaan listrik dan air bersih, dan pembangunan fasilitas komunikasi dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

c. Teori Harrod-Domar

Teori ini merupakan pelengkap dari teori Keynes, di mana Keynes melihatnya dalam jangka pendek (kondisi statis) sedangkan Harrod-Domar melihatnya dalam jangka panjang (kondisi dinamis).

---

<sup>8</sup> Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, 47.

<sup>9</sup> Michael P. Todaro, *Ekonomi Untuk Negara Berkembang*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 158

Teori Harrord-Domar didasarkan pada asumsi sebagai berikut:

- 1) Perekonomian bersifat tertutup
- 2) Hasrat menabung ( $MPS = s$ ) adalah konstan
- 3) Proses produksi memiliki koefisien yang tetap (*constant return to scale*), serta
- 4) Tingkat pertumbuhan angkatan kerja ( $n$ ) adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk

Atas dasar asumsi-asumsi khusus tersebut, Harrord-Domar membuat analisis dan menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap (seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar) hanya bisa tercapai apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan sebagai berikut:

$$g = k = n,$$

Dimana:  $g$  = Growth (tingkat pertumbuhan output)

$k$  = Capital (tingkat pertumbuhan modal)

$n$  = Tingkat pertumbuhan angkatan kerja

Agar terdapat keseimbangan, maka antara tabungan (S) dan investasi (I) harus terdapat kaitan yang saling menyeimbangkan, padahal peran k untuk menghasilkan tambahan produksi ditentukan oleh v (*capital output ratio* = Rasio modal-*output*). Apabila tabungan dan investasi adalah sama (I = S), maka:

$$\frac{I}{K} = \frac{S}{K} = \frac{S}{Y} = \frac{Y}{K} = \frac{S/Y}{K/Y} = \frac{S}{V}^{10}$$

Model Harrod-Domar termasuk dalam *aggregate models* di mana karakteristiknya berhubungan dengan perekonomian secara keseluruhan dan menyangkut komponen agregat, seperti : konsumsi, produksi, investasi, tabungan, ekspor, impor, dan *gross national product*. Model ini bertujuan mengestimasi laju pertumbuhan agregat maksimum yang diharapkan dapat dicapai oleh perekonomian tanpa ada campur tangan dari luar.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, 49

<sup>11</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, 101

#### d. Teori Ekonomi Islam

Abu Yusuf merupakan ahli fiqih pertama yang mencurahkan perhatiannya pada permasalahan ekonomi. Tema yang kerap menjadi sorotan dalam kitabnya terletak pada tanggung jawab ekonomi penguasa terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat, pentingnya keadilan, pemerataan dalam pajak serta kewajiban penguasa untuk menghargai uang publik sebagai amanah yang harus digunakan sebaik-baiknya.

Kitab al-Kharaj ditulis sebagai jawaban dari pertanyaan Khalifah Harun ar-Rasyid seputar keuangan Negara yang berhubungan dengan permasalahan pajak, administrasi penerimaan dan pengeluaran Negara sesuai dengan syariat islam yang dilakukan untuk mencegah kezaliman pada masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kebijakan yang dilakukan tersebut tidak hanya berorientasi pada pencapaian target penerimaan

Negara, tapi juga pada pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Abu Yusuf menganalisa permasalahan-permasalahan fiskal dan menganjurkan beberapa kebijakan bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam permasalahan-permasalahan fiskal tersebut Abu Yusuf mengemukakan bahwa pemerintah bukanlah seorang raja yang dapat berbuat diktator melainkan bertanggung jawab atas hak dan kewajiban pemerintah terhadap rakyatnya untuk kemaslahatan mereka. Tentang pertanahan, Abu Yusuf berpendapat bahwa tanah yang diperoleh dari pemberian dan dapat ditarik kembali jika tidak digarap selama tiga tahun.

Keunggulan dalam sistem ekonomi Abu Yusuf adalah dalam sistem pajak proposional yang menggantikan sistem pajak tetap pada tanah. Pajak ini hanya ditetapkan pada harta yang melebihi kebutuhan rakyat dan ditetapkan berdasarkan kerelaan mereka.

Dalam penggunaan dana publik, beliau mengatakan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk mendukung produktivitas dalam meningkatkan pendapatan Negara.<sup>12</sup>

### **3. Faktor-Faktor yang Menentukan Pertumbuhan Ekonomi**

Dari pemaparan teori-teori di atas, secara keseluruhan faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

#### **a Barang Modal**

Agar ekonomi mengalami pertumbuhan, stok barang modal harus ditambah. Penambahan stok barang modal ini dilakukan melalui investasi. Dalam upaya meningkatkan investasi perlu adanya upaya dalam mendorong peningkatan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah investasi.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta : Granada Press, 2007), 70.

<sup>13</sup> Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro edisi revisi*, (Serang: LP2M IAIN SMH Banten, 2013), 90-92

b Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja

Pertumbuhan penduduk dianggap merupakan faktor positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin besar angkatan kerja maka semakin banyak pula tenaga kerja yang produktif, sementara jumlah penduduk yang lebih besar dapat meningkatkan luasnya pasar dalam negeri.<sup>14</sup>

c Teknologi

Kemajuan ekonomi yang berlaku di berbagai Negara ditimbulkan oleh kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi menimbulkan beberapa efek positif dalam pertumbuhan ekonomi, antara lain kemajuan teknologi dapat meningkatkan keefisienan kegiatan produksi suatu barang, kemajuan teknologi menimbulkan penemuan barang-barang baru yang belum pernah diproduksi sebelumnya, dan kemajuan

---

<sup>14</sup> Michael P. Todaro, *Ekonomi untuk Negara Berkembang: Suatu Pengantar tentang Prinsip-Prinsip, Masalah dan Kebijakan Pembangunan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 159

teknologi juga dapat meningkatkan mutu barang-barang yang diproduksi.<sup>15</sup>

d Uang

Uang memerankan peranan dan fungsi sentral. Uang bagi perekonomian ibarat darah dalam tubuh manusia. Makin banyak uang yang digunakan dalam proses produksi, makin besar output yang dapat dihasilkan. Akan tetapi, dengan jumlah uang yang sama akan mendapatkan hasil output yang lebih besar jika penggunaannya efisien.

e Manajemen

Manajemen adalah peralatan yang sangat dibutuhkan untuk mengelola perekonomian modern, terutama perekonomian yang sangat mengandalkan mekanisme pasar.

f Kewirausahaan

Kewirausahaan secara sederhana didefinisikan sebagai kemampuan dan keberanian mengambil

---

<sup>15</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, 431

resiko untuk memperoleh keuntungan. Para wirausahawan/pengusaha harus mempunyai perkiraan yang matang bahwa input yang dikombinasikan akan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga timbal baliknya akan memberikan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan.

g Informasi

Dengan adanya informasi ini, diharapkan agar para ekonom dalam pengambilan keputusannya dilakukan dengan cepat dan efisien, sehingga sumber daya ekonomi makin efisien. Informasi dapat menunjang pertumbuhan ekonomi.<sup>16</sup>

#### **4. Kebijakan Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi**

Cara mudah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah dengan menaikkan tingkat tabungan dan investasi nasional. Untuk meningkatkan tabungan nasional

---

<sup>16</sup> Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro edisi revisi*, (Serang: LP2M IAIN SMH Banten, 2013), 90-92.

dapat melalui kebijakan fiskal dan moneter. Dengan kebijakan fiskal, yaitu menurunkan pajak akan menaikkan daya beli masyarakat dan juga mendorong kenaikan tabungan masyarakat. Dengan demikian objek pajak bertambah (pendapatan Negara naik) dan sumber dana untuk keperluan investasi meningkat. Sedangkan melalui kebijakan moneter, yaitu menaikkan bunga tabungan sehingga akan menarik minat masyarakat untuk meningkatkan tabungannya.

Kebijakan-kebijakan yang dapat dijalankan untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan diversifikasi kegiatan ekonomi yaitu suatu kebijakan dalam modernisasi kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada atau melakukan transformasi kegiatan ekonomi yang bersifat tradisional kepada kegiatan yang modern.
- b. Mengembangkan infrastruktur. Modernisasi ekonomi memerlukan infrastruktur yang modern pula. Hal ini

dikarenakan kegiatan ekonomi akan berkembang dengan baik apabila didukung oleh infrastruktur yang tersedia dengan kondisi yang baik.

- c. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Peningkatan taraf pendidikan masyarakat akan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Semakin banyak tenaga kerja yang berkualitas tinggi akan semakin cepat terjadinya pertumbuhan ekonomi.
- d. Mengembangkan institusi yang mendorong pembangunan. Pembangunan ekonomi harus secara terus menerus diikuti dengan perkembangan institusi yang dapat memberi dorongan pada perkembangan berbagai kegiatan ekonomi.
- e. Merumuskan dan melaksanakan perencanaan ekonomi. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter tidak akan ada artinya tanpa merumuskan dan melaksanakan perencanaan ekonomi. Melalui perencanaan pembangunan berbagai kegiatan dapat diselenggarakan

dan arah pembangunan ekonomi jangka panjang dapat ditentukan. Setiap perencanaan ekonomi perlu menentukan tujuan pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai dan menentukan strategi dalam melaksanakan perencanaan ekonomi yang telah dirumuskan.<sup>17</sup>

## **5. Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam**

Banyak ahli ekonomi maupun ahli fikih yang memberikan perhatiannya terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dalam pandangan Islam bukan hanya aktivitas produksi saja, akan tetapi seluruh aktivitas dalam bidang produksi yang berkaitan dengan keadilan distribusi. Bukan hanya membahas tentang persoalan ekonomi saja. Pertumbuhan ekonomi dalam Islam membahas tentang aktivitas manusia untuk maju dalam sisi material dan spiritual.

Penekanan disini ialah pertumbuhan ekonomi telah ada dalam wacana pemikiran muslim klasik, yang dibahas

---

<sup>17</sup> Asfia Murni, *Ekonomika Makro*, 183-185.

dalam “pemakmuran bumi”<sup>18</sup> yang merupakan pemahaman dari firman Allah Swt Qs. Hud (11) ayat 61 :

وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن  
إِلَٰهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا  
فَاسْتَعْرِفُوهُ ثُمَّ تَوَبُّوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ٦١

“Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)".<sup>19</sup>

Terminologi tentang “pemakmuran tanah” mengandung pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib kepada seorang gubernurnya di Mesir.

“Hendaklah kamu memperhatikan pemakmuran tanah dengan perhatian yang lebih besar daripada orientasi pemungutan pajak, karena pajak sendiri hanya dapat dioptimalkan dengan pemakmuran tanah. Barangsiapa yang memungut pajak, tanpa memperhatikan pemakmuran tanah, Negara tersebut akan hancur”.

<sup>18</sup> Nurul Huda dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, 124.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Al-Hikmah, 2008), 394.

Beberapa pemahaman pokok mengenai pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari perspektif Islam diantaranya mengenai batasan tentang persoalan ekonomi. Perspektif Islam tidaklah sama dengan yang dianut oleh kapitalis, dimana yang dimaksud dengan persoalan ekonomi yaitu persoalan kekayaan dan minimnya sumber-sumber kekayaan. Perspektif Islam menyatakan bahwa hal itu sesuai dengan kapasitas yang telah disediakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang ditujukan untuk mengatasi persoalan kehidupan manusia.

Kemudian dilihat dari tujuan pokoknya, Islam tidak melihat pertumbuhan kekayaan sebagai sesuatu yang terpisah dengan cara distribusinya dan tuntunan realisasi keadilan sosial. Hal ini karena Islam terhubung dengan cara distribusinya, tuntunan untuk merealisasikan pertumbuhan kekayaan bagi anggota masyarakat dalam suasana kemudahan dan kasih sayang, dan berbagai persyaratan yang memungkinkan mereka dapat saling memberi dan menjalankan tugas dalam kehidupan. Di sisi lain, Islam

mendorong agar produk masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok semua anggotanya dengan sejumlah komoditas yang memang diperlukan dalam tingkat berimbang bagi keseluruhan untuk mendapatkannya.<sup>20</sup>

Jika secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan suatu proses kenaikan barang dan jasa secara berkesinambungan di suatu Negara atau Daerah yang menyebabkan naiknya GDP riil perkapita menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu yang dijadikan sebagai suatu ukuran kesejahteraan ekonomi. Bagaimana Islam mengkritisi GDP riil perkapita yang dijadikan sebagai indikator bagi kesejahteraan suatu Negara? Satu hal yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan yang sistem ekonomi yang lainnya adalah penggunaan parameter *falah*.

Falah yaitu kesejahteraan hakiki, kesejahteraan yang sebenar-benarnya, dimana komponen-komponen rohaniah masuk ke dalam pengertian falah ini. Ekonomi Islam dalam arti sebuah sistem ekonomi (*nidhom al-istishad*)

---

<sup>20</sup> Nurul Huda dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, 125.

merupakan sebuah sistem yang dapat mengantar umat manusia kepada *real welfare (falah)*, kesejahteraan yang sebenarnya. Maka dari itu, selain harus memasukkan unsur *falah* dalam menganalisis kesejahteraan, perhitungan pendapatan nasional berdasarkan Islam juga harus mampu mengenali bagaimana interaksi instrument-instrumen wakaf, zakat, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan umat.<sup>21</sup>

## **B. Pengeluaran Daerah**

Pengeluaran daerah terdiri dari belanja langsung, belanja tak langsung dan pengeluaran pembiayaan daerah. Belanja tak langsung meliputi bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja tak langsung terdiri dari: belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, belanja bunga, belanja hibah belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja

---

<sup>21</sup> Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2008), 28

bantuan keuangan, serta belanja tak terduga. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari belanja belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.

Jumlah pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dalam suatu periode tertentu tergantung pada beberapa faktor, yaitu:

a) Jumlah pajak yang diramalkan

Dalam menyusun anggaran belanjanya, pemerintah harus terlebih dahulu membuat proyeksi mengenai jumlah pajak yang akan diterima. Makin banyak jumlah pajak yang dapat dikumpulkan maka makin banyak pula pembelanjaan pemerintah yang akan dilakukan.

b) Tujuan ekonomi yang ingin dicapai

Pemerintah penting sekali perannya dalam mengatur perekonomian. Kegiatannya dapat mengatur kegiatan ekonomi ke arah yang diinginkan.

Beberapa tujuan penting dari kegiatan pengeluaran pemerintah adalah mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi, dan mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah sering membelanjakan uang lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh dari pajak. Untuk mengatasi pengangguran dan menarik minat swasta untuk berinvestasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, misalnya pemerintah perlu membiayai pembangunan infrastruktur seperti irigasi, jalan-jalan, pelabuhan, membangun pendidikan dan kesehatan. Usaha ini memerlukan banyak uang dan pendapatan dari pajak saja tidak cukup untuk membiayai semua itu, maka untuk membiayainya pemerintah terpaksa berhutang atau mencetak uang baru.

c) Pertimbangan politik dan kestabilan Negara

Pertimbangan politik dan kestabilan Negara selalu menjadi salah satu tujuan penting dalam penyusunan anggaran belanja pemerintah. Kekacauan politik menyebabkan kenaikan pembelanjaan pemerintah yang sangat besar terutama bila operasi militer perlu dilakukan. Ancaman kestabilan dari Negara luar juga dapat menimbulkan pengeluaran yang besar dalam pengeluaran militer dan akan memaksa pemerintah membelanjakan pengeluarannya lebih besar dari penerimaan pajak.<sup>22</sup>

Apabila berbicara mengenai klasifikasi belanja daerah menurut kelompok belanja, maka Permendagri Nomor 13 tahun 2006 membaginya ke dalam kelompok berikut ini:

Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tak

---

<sup>22</sup> Norista Gathama Putra, "Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Operasi terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah," (Skripsi, Program Sarjana, FE, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011), hal 36-38

terduga. Sedangkan belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Belanja tak langsung merupakan belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh ada tidaknya program dan kegiatan SKPD, sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program dan kegiatan SKPD yang kontribusinya terhadap pencapaian prestasi kerja dapat diukur.<sup>23</sup>

Klasifikasi belanja daerah berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi dua yaitu belanja operasi dan belanja modal.<sup>24</sup>

## **1. Belanja Modal**

Definisi belanja modal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran yaitu pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset tetap/asset

---

<sup>23</sup> Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 227-228

<sup>24</sup> Fitria Megawati Sularno, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal," (Skripsi, Program Sarjana, FE, Universitas Widyatama, Bandung, 2013)

lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan/pemeliharaan barang/asset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal atau bukan dan merupakan syarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang/asset, kriteria tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya asset dan/atau bertambahnya masa manfaat/umur ekonomis asset berkenaan;
- b. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, peningkatan standar kinerja, atau volume asset;
- c. Memenuhi nilai minimum kapitalisasi;
- d. Pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan/dipasarkan kepada masyarakat atau entitas lain di luar pemerintah.

Belanja modal antara lain dipergunakan untuk:

a. Belanja modal tanah

Seluruh pengeluaran untuk pengadaan atau pembelian atau pembebasan atau penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai;

b. Belanja modal peralatan dan mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan;

c. Belanja modal gedung dan bangunan

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak (kontraktual);

d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai asset dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan;

e. Belanja modal lainnya

Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat

diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan (jalan, irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat.

Termasuk dalam belanja modal ini adalah belanja modal non-fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur;

f. Belanja modal Badan Layanan Umum (BLU)

Pengeluaran untuk  
pengadaan/perolehan/pembelian asset yang

dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.<sup>25</sup>

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah asset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relative kurang produktif.<sup>26</sup>

Sesuai Permendagri Nomor 13 tahun 2006, belanja modal merupakan bagian dari kelompok belanja daerah, yang memiliki pengertian berupa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud, yang mempunyai

---

<sup>25</sup> “Klasifikasi Jenis Belanja”, <http://www.jdih.kemenkeu.go.id> (Diakses pada tanggal 18 Maret 2018, pada pukul 09.00 WIB)

<sup>26</sup> Saptaningsih Sumarmi, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta”, dalam *Jurnal Akmedika Universitas PGRI Yogyakarta Edisi IV*, 3.

nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Kegiatan dalam rangka penganggaran dan realisasi belanja modal bukan suatu pekerjaan yang mudah, segenap persoalan sering kali muncul di setiap tahap kegiatan, antara lain tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap penatausahaan. Masalah yang muncul dalam tahap perencanaan yaitu masalah penetapan alokasi anggaran, masalah penetapan mata anggaran, adanya intervensi dari pihak legislatif, kesalahan penetapan mekanisme pengadaan, ketidakpatuhan terhadap arahan dan kebijakan umum belanja modal dan kelemahan dalam studi kelayakan. Kemudian masalah yang muncul dalam tahap pelaksanaan antara lain masalah kebenaran formal kegiatan pengadaan, adanya korupsi dalam pengadaan belanja modal dan masalah penyerapan anggaran. Masalah terakhir yang sering muncul dalam realisasi suatu anggaran termasuk belanja modal adalah pada penatausahaan atas transaksi yang ditimbulkan atau

secara spesifik menyangkut masalah perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang sering mendapat koreksi dari Badan Pemeriksa Keuangan. Jenis kesalahan yang biasanya terjadi adalah pada penetapan mata anggarannya, misalnya ada belanja modal yang seharusnya didanai dengan menggunakan dana belanja modal ternyata didanai dari belanja barang atau sebaliknya. Sedangkan permasalahan lain yang juga sering muncul adalah pada ketersediaan bukti kepemilikan suatu asset, misalnya sertifikat tanah yang sering belum lengkap.<sup>27</sup>

## **2. Belanja Operasi**

Belanja operasi adalah belanja yang dikeluarkan dari Kas Umum Negara/Daerah dalam rangka menyelenggarakan operasional pemerintah. Belanja operasi (konsumsi pemerintah) disebut juga dengan output non-pasar pemerintah. Kegiatan pemerintah meliputi kegiatan administrasi pemerintah baik pusat maupun daerah, termasuk juga administrasi pertahanan dan

---

<sup>27</sup> Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 228-235.

keamanan. Belanja operasi selanjutnya diklasifikasikan lagi menjadi :

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja barang
- c. Bunga
- d. Subsidi
- e. Hibah
- f. Bantuan sosial
- g. Belanja lain-lain/tak terduga

Belanja operasi (konsumsi Pemerintah) disebut juga dengan output non-pasar pemerintah. Kegiatan pemerintah meliputi kegiatan administrasi pemerintah, baik pusat maupun daerah, termasuk juga administrasi pertahanan dan keamanan. Pemerintah daerah dalam hal ini meliputi Pemerintah di tingkat Provinsi, Kabupaten dan tingkat Desa. Sedangkan pemerintah pusat mencakup seluruh instansi Negara, baik yang ada di pusat maupun kantor wilayahnya (vertikal) yang di daerah. Dalam kegiatan ini tidak termasuk kegiatan yang dilakukan oleh

perusahaan-perusahaan milik Negara seperti Perum, Perjan, dan PT, karena kegiatan-kegiatan ini telah tercakup dalam sektor yang bersangkutan atau lapangan usaha masing-masing. Kegiatan pemerintah berfungsi untuk menyediakan jasa pelayanan umum bagi masyarakat yang secara ekonomis sulit dinilai, seperti melaksanakan administrasi pemerintah, menjaga kestabilan dan keamanan Negara, meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat, mengatur kebijaksanaan perekonomian Negara lainnya. Dengan demikian kegiatan pemerintah berbeda dengan kegiatan ekonomi lainnya. Dalam rangka penghitungan konsumsi pemerintah digunakan data laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa yang diperoleh dari daftar K.1, K.2 dan K.3. Laporan keuangan tersebut meliputi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari masing-masing tingkat Pemerintah Daerah.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Singgih Samsuri, "Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap

Salah satu jenis belanja operasi yaitu belanja pegawai yang dapat didefinisikan sebagai pengeluaran honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah.<sup>29</sup> Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran, Belanja pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat Negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Belanja pegawai antara lain dipergunakan untuk:

---

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Se-Sumatra,” (Skripsi, Program Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016), hal 32-33

<sup>29</sup> Katalog BPS: 7103005.36, “Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Banten 2008-2010”, <https://www.banten.bps.go.id>. (diunduh pada tanggal 20 Januari 2018), hal 8

- a. Belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada pembayaran gaji pegawai negeri meliputi PNS dan TNI/POLRI;
- b. Belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada pembayaran gaji pejabat Negara;
- c. Belanja uang makan PNS;
- d. Belanja uang laup pauk TNI/POLRI;
- e. Belanja uang tunggu dan pension pegawai negeri dan pejabat Negara yang disalurkan melalui PT.TASPEN dan PT.ASABRI;
- f. Belanja asuransi kesehatan pegawai negeri yang disalurkan melalui PT.ASKES;
- g. Belanja uang lembur PNS;
- h. Belanja pegawai honorer yang diangkat dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi unit organisasi pemerintah;
- i. Pembayaran tunjangan sosial bagi pegawai negeri melalui unit organisasi/lembaga/badan tertentu;
- j. Pembayaran uang vakasi;

- k. Pembayaran tunjangan khusus merupakan pembayaran kompensasi kepada pegawai negeri yang besarnya ditetapkan oleh Presiden/Menteri Keuangan;
- l. Belanja pegawai transitio merupakan alokasi anggaran belanja pegawai yang direncanakan akan ditarik/dicairkan namun database pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga berkenaan menurut peraturan perundang-undangan belum dapat direkam pada aplikasi belanja pegawai satuan kerja (Satker) karena belum ditetapkan sebagai pegawai negeri pada Satker berkenaan; dan
- m. Pembayaran untuk uang duka wafat/tewas yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikecualikan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai output dalam katagori belanja barang.<sup>30</sup>

### C. Hubungan Antar Variabel

#### 1. Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi

Investasi termasuk dalam pengertian belanja modal yang tidak lain adalah *capital expenditure*, yang didefinisikan sebagai belanja/pengeluaran yang memberi manfaat lebih dari satu tahun.<sup>31</sup> Porsi belanja modal dalam APBD, merupakan komponen belanja yang sangat penting karena realisasi belanja modal akan memiliki *multiplier effect* dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya diharapkan semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin berkurang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

---

<sup>30</sup> “Klasifikasi Jenis Belanja”, <http://www.jdih.kemenkeu.go.id> (Diakses pada tanggal 18 Maret 2018)

<sup>31</sup> Abdul Halim, *Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik-Pemerintah Daerah*, 5

## **2. Hubungan Belanja Operasi dengan Pertumbuhan Ekonomi**

Belanja operasi adalah belanja yang dikeluarkan dikeluarkan Kas Umum Negara/Daerah dalam rangka menyelenggarakan operasional pemerintah. Belanja operasi (konsumsi pemerintah) disebut dengan output non-pasar pemerintah. Kegiatan pemerintah meliputi kegiatan administrasi pemerintah baik pusat maupun daerah, termasuk juga administrasi pertahanan dan keamanan.<sup>32</sup> Secara langsung ataupun tidak langsung, belanja operasi memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Keberadaannya memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung segala kegiatan operasional pemerintah yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

## **3. Hubungan Belanja Modal dan Belanja Operasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Dalam hal ini pengeluaran pemerintah yaitu Belanja Modal dan Belanja Operasi, berperan dalam pembentukan

---

<sup>32</sup> Abdul Halim, *Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik-Pemerintah Daerah*, 5.

modal melalui pengeluaran pemerintah di berbagai bidang seperti sarana dan prasarana.

Pembentukan modal di bidang sarana dan prasarana ini umumnya menjadi *social overhead capital* (SOC) yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. SOC ini sangat penting karena pihak swasta tidak akan mau menyediakan berbagai fasilitas publik, namun tanpa adanya fasilitas publik ini maka pihak swasta tidak berminat untuk menanamkan modalnya. Dengan adanya berbagai fasilitas publik ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan.

Peningkatan pendapatan berarti peningkatan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak. Sebagaimana diketahui bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, maka peningkatan pajak berarti peningkatan pengeluaran pemerintah. Keadaan ini membuat suatu siklus yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Kenaikan pengeluaran pemerintah akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pertumbuhan

ekonomi akan meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah yang diperuntukkan bagi pembangunan.<sup>33</sup>

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Altito R. Siagian, “Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Wilayah (Studi Kasus Provinsi Jawa Barat)”. Hasil analisis menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan secara statistik sebesar 211.3880 terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada 25 Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Sementara itu untuk ketimpangan wilayah, desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik sebesar 287.8996 ketimpangan wilayah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Selama 5 tahun pelaksanaan desentralisasi fiskal di Provinsi Jawa Barat secara empirik dapat dibuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi dari 25 kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

---

<sup>33</sup> Singgih Samsuri, “Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Se-Sumatra,” (Skripsi, Program Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016).

meningkat tiap tahunnya, tetapi grafik pertumbuhan ekonomi meningkat tiap tahunnya justru meningkatkan ketimpangan wilayah yang terjadi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.<sup>34</sup>

Penelitian oleh Siti Mawaddah yang berjudul “Pengaruh Infrastruktur Jalan Mantap terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten Tahun 2012-2015”. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa infrastruktur jalan mantap berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t yang menunjukkan tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,0001. Adanya pengaruh yang signifikan tersebut menjelaskan bahwa semakin mantap kondisi infrastruktur jalan, maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun hasil perhitungan koefisien determinasi (*R Square*) adalah sebesar 0,306 hasil ini berarti infrastruktur jalan mantap hanya memberikan pengaruh sebesar 30,6% terhadap

---

<sup>34</sup> Altito R. Siagian, “Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Wilayah (Studi Kasus Provinsi Jawa Barat),” (Skripsi, Program Sarjana, FE, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010).

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten sedangkan sisanya 69,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.<sup>35</sup>

Fitria Megawati Sularno, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PDRB memiliki t hitung sebesar 6,045 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, dimana nilai sig di bawah 0,05, sehingga variabel PDRB berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal dan memiliki koefisien positif sebesar 2,963. Variabel PAD memiliki t hitung sebesar 2,996 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003, dimana nilai sig di bawah 0,05, sehingga variabel PAD berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal dan memiliki koefisien positif sebesar 0,399. Variabel DAU memiliki t hitung sebesar 1,936 dengan nilai signifikansi sebesar 0,055, dimana nilai sig di atas 0,05, sehingga variabel DAU tidak berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal dan memiliki koefisien positif sebesar 0,057. Berdasarkan

---

<sup>35</sup> Siti Mawaddah, “Pengaruh Infrastruktur Jalan Mantap terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten Tahun 2012-2015,” (Skripsi, Program Sarjana, FEBI, UIN SMH Banten, 2017).

pengujian yang telah dilakukan PDRB, PAD dan DAU diperoleh nilai F hitung sebesar 75,169 dengan tingkat signifikansi 0,000, jauh lebih kecil dari 0,05. Dengan kata lain, PDRB, PAD dan DAU secara simultan berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal.<sup>36</sup>

Penelitian oleh Siti Ita Khaerul Musbitah yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran di Tangerang Selatan Tahun 2011-2013”. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Tangerang Selatan. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung  $3,404 > t$  tabel 2,032. Dilihat dari nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar  $0,254 = 25\%$ , artinya besarnya pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran adalah sebesar  $25\%$ .<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Fitria Megawati Sularno, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal,” (Skripsi, Program Sarjana, FE, Universitas Widyatama, Bandung, 2013).

<sup>37</sup> Siti Ita Khaerul Musbitah, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran di Tangerang Selatan Tahun 2011-2013,” (Skripsi, Program Sarjana, FEBI, UIN SMH Banten, 2017).

Artriyani Syahnur Tirta, "Analisis Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah". Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa 1) variabel inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran yaitu sebesar 0,031815. 2) variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran yaitu sebesar 0,116828. 3) variabel investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran yaitu sebesar 0,208683. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ada pengaruh antara inflasi, pertumbuhan ekonomi dan investasi terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Tengah.<sup>38</sup>

Dari pemaparan penelitian terdahulu di atas, perbedaan dengan penelitian ini terletak pada variabel X2. Penelitian terdahulu tidak membahas tentang belanja operasi. Sedangkan penelitian ini, pada variabel X2 membahas tentang belanja operasi yang hanya akan difokuskan pada jenis belanja pegawainya saja.

---

<sup>38</sup> Artriyani Syahnur Tirta, "Analisis Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah," (Skripsi, Program Sarjana, FE, UNNES, Semarang, 2013).

## **E. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah yang diajukan dan jawaban itu masih diuji secara empiris kebenarannya. Adapun perumusan hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

$H_0$ : Diduga belanja modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Banten periode 2011-2016

$H_a$ : Diduga belanja modal berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Banten periode 2011-2016

$H_0$ : Diduga belanja operasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Banten periode 2011-2016

$H_a$ : Diduga belanja operasi berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Banten periode 2011-2016